



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian kinerja dan sasaran strategis organisasi kepada pimpinan dan publik, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Watampone memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Sejalan dengan itu, laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Watampone pada periode tahun 2019 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Watampone bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan, hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan. Selain itu Pengadilan Agama Watampone tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum

pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang keliling dan pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas.

Meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2019 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan adalah sebesar 367,35 %, lebih baik dari tahun 2018, yakni 99,05%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja yang sangat baik.

LKjIP Tahun 2019 ini diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

B. Saran

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahun 2019, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan LKjIP ditahun mendatang perlu tetap memperhatikan hasil Evaluasi Penetapan Kinerja;
2. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Watampone, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran;
3. Perlu dioptimalkan pemanfaatan LKjIP Tahun 2019 ini sebagai alat evaluasi bagi Pengadilan Agama Watampone;
4. Perlu lebih mempertajam dalam perencanaan program dan anggaran agar target yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.